

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris berarti suatu negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia sebagai petani.

Agar pertanian dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional, menghadapi dinamika globalisasi dan perdagangan bebas diperlukan suatu perencanaan nasional dengan pemilihan atas prioritas dan sasaran dari program pembangunan pertanian. Salah satu aspek yang cukup menentukan keberhasilan pembangunan adalah penyebaran investasi yang sesuai dengan kondisi dan lokasi masyarakat (Suhendra, 2004).

Dalam tiga dekade terakhir, pembangunan nasional menitikberatkan pada sektor manufaktur, sementara sektor pertanian yang sampai saat ini masih merupakan tumpuan hidup masyarakat pada umumnya hanya diposisikan sebagai sektor pendukung. Di banyak negara, sektor pertanian sebagai prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Era globalisasi yang akan datang memberikan peluang bagi sektor pertanian untuk berkembang lebih cepat, tetapi sekaligus memberikan tantangan baru karena komoditas pertanian harus mempunyai keunggulan daya saing dan kemandirian produk pertanian sedemikian rupa sehingga mampu bersaing baik di pasar domestik ataupun pasar internasional (Suhendra, 2004).

Dampak pembangunan dapat dilihat dari variabel makro ekonomi dimana pembangunan pertanian dan pedesaan menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan pertanian dan pedesaan memiliki potensi yang cukup besar terkait dengan masalah-masalah kontribusi

terhadap perekonomian nasional melalui hasil yang diperoleh dari pendapatan domestik bruto, sehingga sektor pertanian ditempatkan pada posisi prioritas dalam rencana pembangunan nasional.

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain yaitu potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat berbasis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian nasional Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari masyarakat pelaku petani masih banyak yang tergolong pada masyarakat menengah kebawah.

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satupun yang menguntungkan bagi sektor ini. Sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan data statistik tahun 2009, jumlah penduduk Indonesia yang berkerja di sektor pertanian cukup tinggi (41.331.706 jiwa), disusul oleh sektor perdagangan (21.221.744 jiwa), dan jasa (13.099.817 jiwa).

Peran sektor pertanian yang meliputi pertanian pangan dan hortikultural, perkebunan, peternakan dan perikanan, dalam perekonomian nasional selama ini masih bisa dikatakan dominan. Namun, produktivitas sektor pertanian tercatat paling rendah dibandingkan sektor lain. Kondisi ini disebabkan faktor-faktor antara lain penguasaan lahan pertanian yang terlalu sempit, kurangnya penguasaan informasi pasar dan iptek pertanian, rendahnya nilai tambah produk pertanian dan adanya periode menunggu hasil usaha pertanian. Disamping itu, produksi

pertanian belum mampu menjamin kelangsungan dan kualitas yang baik, serta adanya kebijakan impor komoditas tertentu.

Kebijakan pembangunan sektor pertanian diajukan untuk; (a) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dalam arti luas yang meliputi subsektor pertanian melalui usaha pertanian berwawasan agribisnis; (b) meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan keluarga dan daerah, serta memenuhi bahan baku industri pengolahan untuk mengisi pasar domestik dan ekspor; (c) meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; (d) meningkatkan kemandirian pelaku usaha sektor pertanian melalui pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pertanian.

Pembangunan sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara agraris yang melakukan kegiatannya di sektor pertanian. Indonesia yang merupakan Negara dengan basis perekonomian agraris, tidak mungkin melepaskan pembangunan pertanian dalam seluruh kebijakan pembangunan nasional, bahkan merupakan kewajiban menjadikan pembangunan sebagai prioritas. Menurut Hanani (2003) bahwa pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional dengan alasan sebagai berikut:

- a. Potensi sumber dayanya besar dan beragam
- b. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar
- c. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional
- d. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian
- e. Peranannya dalam menyediakan pangan masyarakat
- f. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya melibatkan seluruh kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat di berbagai sektor. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan

potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan keadaan di ataslah, penulis ingin mengelompokan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang melakukan pengolahan hasil pertanian menurut wilayah dan subsektor per tahun 2013, sehingga diperoleh *cluster* provinsi yang memiliki karakteristik yang mirip dimana akan berguna bagi pemerintah untuk perencanaan kebijakan pembangunan pada sektor pertanian.

Ada beberapa metode pengelompokan analisis *cluster* yang banyak dikenal, antara lain *k-means cluster* dan *average linkage cluster*. Berdasarkan penelitian Larasati (2014) pada kasus perbandingan kinerja metode *complete linkage*, metode *average linkage*, dan metode *k-means* dalam menentukan hasil analisis *cluster*, didapat bahwa pengelompokan dengan metode *complete linkage*, dan *average linkage* lebih baik bila dibandingkan dengan metode *k-mean* berdasarkan perbandingan nilai simpangan baku ( $s$ ), sedangkan berdasarkan penelitian Febriyana (2011) pada kasus pengelompokan data indikator kemiskinan kabupaten di Indonesia tahun 2009, didapat bahwa pengelompokan *k-means cluster* lebih baik dibandingkan *average linkage cluster* berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh.

Pengelompokan di bidang pertanian dirasa sangatlah bermanfaat, baik bagi pelaku petani itu sendiri maupun bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang diberi judul “**Analisis Cluster Untuk Mengklasifikasikan Sektor Pertanian Berdasarkan Data Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Di Indonesia**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pengklasifikasian *K-Means* dan *Average Linkage*.
2. Provinsi mana saja di Indonesia yang diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah terkait bidang pertanian.

### 1.3. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk membandingkan hasil klasifikasi *k-means* dengan hasil klasifikasi *average linkage*.
2. Mengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan pada sektor pertanian daerah untuk mengetahui provinsi mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan tepat guna terkait sektor pertanian.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah  
Sebagai dasar untuk menentukan provinsi mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih terkait sektor pertanian daerah, sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
  - b. Bagi penulis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan temuan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut.